

PRODUK UNGGULAN DAN IMPLIMENTASINYA
DI KABUPATEN ACEH UTARA

Muhammad Nasir, Hilmi, Yetti Tri Putri, Lianti, Nurmila Dewi^{*)}

^{*)}Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe, Indonesia

Abstract: *This study aimed to know the featured commodity and commodity and potential businesses which is yet to be superior, but has the potential to excel in the future if they are given a special treatment or policies; and provide recommendations which commodities or featured businesses that need / could be developed in each sub-district. Besides, it also increases the role of banks in the development featured KPJu and District Government's policies, which is also associated with the Provincial and Central Government policies, in order to develop the featured commodity as well as small and medium businesses. The data used in this research is secondary data collected from the Central Statistical Bureau and also from other relevant sources. Meanwhile the primary data are achieved from interviews with stakeholders in the sub-district and district level through Focus Group Discussion (FGD). The results of this study indicate that commodities such as palm oil, rice, cocoa, fishing at sea, chili, rubber, durian and livestock is very good to be developed in North Aceh District. However necessary assistance for the featured KPJu SMEs is very crucial and needs to be intensified and implemented sustainably. In connection with that, the involvement of institutional companion such as Business Development Service (BDS) or the existing SMEs Business Incubator need to be further enhanced in term of their role and function with the support of Universities and related Institutions. Moreover, there is also a need for a continuation of the current collaboration between the Regional Government and local College in the area, of which needs to be improved and developed. The three universities obligation knows as Tridharma Universitas in Indonesia, in particular dharma Community Services, as well as co-curricular programs such as on the job training or other co-curricular activities should be developed as an assistance program of the featured SMEs KPJu.*

Keywords: *AHP modification, local featured commodity and poverty alleviating strategy*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Data Kementerian Negara Koperasi & UKM tahun 2015 menunjukkan beberapa fakta menyangkut pentingnya eksistensi UMKM; *Pertama*, jumlah industrinya dalam setiap sektor ekonomi tercatat sebanyak 51,3 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. *Kedua*, potensinya dalam penyerapan tenaga kerja menyerap 97,04% dari total angkatan kerja yang bekerja. *Ketiga*, *share* UMKM dalam pembentukan PDB yang relatif besar yaitu mencapai 55,56% dari total PDB.

Perlunya upaya untuk memperkuat dan mendorong UMKM agar dapat tumbuh lebih baik. Disamping itu, pihak perbankan juga perlu mendorong kebijakan perkreditan yang dapat memacu menyalurkan kredit kepada UMKM. *Kedua*, pengembangan kelembagaan yang dilakukan dengan cara kerjasama antar lembaga keuangan, seperti antara bank umum dan BPR serta antara BPR dan Lembaga Dana Keuangan Pedesaan, bertujuan agar cakupan penyaluran

kredit menjadi luas. *Ketiga*, pemberian bantuan teknis yang meliputi: pelatihan kepada Perbankan dan Lembaga Pembiayaan UMKM, penyediaan informasi mengenai hasil penelitian, statistik perkreditan, dan data komoditas potensial suatu daerah, dan promosi UMKM dalam menjembatani hubungan UMKM dengan Perbankan. Kebijakan UMKM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bertujuan mendorong bank agar meningkatkan penyaluran kredit untuk UMKM dan membantu meningkatkan kapabilitas UMKM agar mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode modifikasi *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Disebut demikian karena penelitian ini juga menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), Metode Borda dan Metode Bayes dalam menetapkan KPJu unggulan kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi. Data dan informasi dalam Penelitian Pengembangan KPJu Unggulan UMKM meliputi berbagai aspek. Aspek makro berupa kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah dan potensi ekonomi daerah dalam rangka pengembangan UMKM. Sementara pada aspek mikro, meliputi kondisi dan potensi UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan UMKM di Provinsi Aceh. Lebih dalam lagi, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memprioritaskan kebijakan ekonomi melalui pengembangan KPJu unggulan di suatu Kabupaten sebagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan berujung pada pengurangan angka/tingkat kemiskinan di daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai KPJu unggulan per sektor/sub sektor ekonomi dan lintas sektoral dan KPJu potensial yang perlu dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara dan di tingkat dan kecamatan). Informasi yang dikemukakan secara rinci menjabarkan :

1. Memberikan informasi tentang KPJu unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan.
2. Memberikan informasi dan permasalahan yang timbul dari masing-masing KPJu unggulan lintas sektoral di masing-masing kecamatan

Prinsip – prinsip Dasar *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Kelebihan AHP dibandingkan dengan metode lain karena adanya struktur berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai kepada sub- sub kriteria yang paling mendetail. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan (Saaty, 1990). Karena menggunakan input persepsi manusia, model ini dapat mengolah data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kompleksitas permasalahan yang ada disekitar kita dapat didekati dengan baik oleh model AHP ini. Selain itu AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi-objektif dan multi-kriteria berdasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hierarki. Jadi model ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif.

Ada beberapa prinsip yang harus dipahami dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP, diantaranya adalah :

decomposition, comparative judgement, synthesis of priority dan logical consistency (Sri Mulyono, 2007 : 220).

Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Jadi perbedaan yang mencolok model AHP dengan model lainnya terletak pada jenis inputnya. Terdapat 4 aksioma-aksioma yang terkandung dalam model AHP

1. **Reciprocal Comparison** artinya pengambilan keputusan harus dapat memuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensi tersebut harus memenuhi syarat resiprokal yaitu apabila A lebih disukai daripada B dengan skala x, maka B lebih disukai daripada A dengan skala $1/x$
2. **Homogeneity** artinya preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen- elemennya dapat dibandingkan satu sama lainnya. Kalau aksioma ini tidak dipenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogen dan harus dibentuk cluster (kelompok elemen) yang baru
3. **Independence** artinya preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh objektif keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan dalam AHP adalah searah, maksudnya perbandingan antara elemen-elemen dalam satu tingkat dipengaruhi atau tergantung oleh elemen-elemen pada tingkat di atasnya
4. **Expectation** artinya untuk tujuan pengambilan keputusan. Struktur hirarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria atau objektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap.

Selanjutnya Saaty (2001) menyatakan bahwa proses hirarki analitik (AHP) menyediakan kerangka yang memungkinkan untuk membuat suatu keputusan efektif atas isu kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pendukung keputusan.

Prinsip Kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting

variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut (Marimin, 2004). Pada dasarnya langkah-langkah dalam metode AHP meliputi : Menyusun hirarki dari permasalahan.

Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur

hierarki seperti Gambar 1. di bawah ini :
 Gambar 1. Struktur Hierarki AHP

1. Penilaian kriteria dan alternatif

Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1988), untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan

Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya Proses perbandingan berpasangan, dimulai dari level hirarki paling atas yang ditujukan untuk memilih kriteria, misalnya A,

kemudian diambil elemen yang akan dibandingkan, misal A1, A2, dan A3. Maka susunan elemen-elemen yang dibandingkan tersebut akan tampak seperti pada gambar matriks di bawah ini :

Tabel 2. Contoh matriks perbandingan berpasangan

	A1	A2	A3
A1	1		
A2		1	
A3			1

2. Penentuan prioritas

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif.

3. Konsistensi Logis

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingatkan secara konsisten sesuai dengan

suatu kriteria yang logis. Matriks bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan tersebut harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal. Hubungan tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut (Suryadi & Ramdhani, 1998). Selanjutnya nilai dari daftar RI dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Indeks Random

Ukuran Matriks	1,2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nilai RI	0	0,6	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang terangkum dalam ruang lingkup penelitian. Data dikumpulkan melalui review dokumen, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan

wawancara dengan pejabat terkait di tingkat kecamatan. Secara umum, sektor, sub sektor dan komoditas untuk penentuan KPJu Unggulan dalam penelitian ini dapat dilihat pada **table 4** berikut:

Pertambangan	Pertambangan, minyak dan gas bumi	Minyak, gas bumi
	Penggalian	Koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir, tanah liat
Perindustrian	Industri pengolahan migas	Tidak ada
	Industri pengolahan tanpa migas	Industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, industri kayu, bamboo dan rotan, industri kertas, industri kimia, industri logam
Perdagangan	Perdagangan Besar	Kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga yang tidak mencari untung
	Perdagangan Eceran	Kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru atau barang lama.
Jasa-jasa	Hotel	Hotel berbintang maupun tidak serta tempat tinggal yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap dimana kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dgn penginapan.
	Restoran	Rmh makan, warung nasi, warung kopi, katering & kantin
Angkutan	Angkutan Jalan Raya	Bus, mini bus
	Angkutan Sungai	Boat
	Angkutan Laut	Kapal, boat
	Danau dan Penyeberangan	Rakit
	Jasa penunjang angkutan	RBT
Pariwisata	Hiburan	Karaoke, kafe, water boom
	Kebudayaan	Mesium, kuburan
	Rekreasi	Pantai, dll
Sektor	Sub Sektor	Komoditas
Pertanian	Tanaman Pangan	Padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, umbi-umbian
	Tanaman Sayur	Bayam, kacang panjang, cabe
	Tanaman Buah-buahan	Pisang, papaya, tomat
	Perikanan	Ikan tuna, ikan mas, dan jenis ikan darat lainnya. Ikan payau, udang, cumi-cumi, rumput laut
	Kehutanan (non kayu)	Rotan, arang, bamboo, kopal, menjangan
	Peternakan	Sapi, kerbau, kambing, ayam, itik
	Perkebunan	Cengkeh, jahe, kakao, karet, kapas, kayumanis, kelapa, kemiri, kelapa sawit, pala, panili, lada, tembakau, teh, kopi

Kriteria Penentuan KPJu Unggulan, terdapat dua kelompok kriteria yang akan digunakan untuk menyaring KPJu menjadi KPJu unggulan, yaitu: (1) Kriteria untuk tingkat kecamatan, yakni jumlah unit/rumah tangga, jangkauan pemasaran, sumbangan terhadap perekonomian lokal dan ketersediaan bahan baku; dan (2) Kriteria untuk tingkat kabupaten, antara lain TK terdidik, bahanbaku, modal, sarana produksi/usaha, teknologi, sosial budaya, manajemen usaha, ketersediaan pasar, harga, penyerapan TK dan sumbangan terhadap perekonomian.

Penilaian perbandingan antar KPJu untuk setiap kriteria didasarkan atas kondisi saat ini dan prospeknya. Penilaian (*scoring*) setiap kriteria didasarkan atas prinsip kemudahan bagi UMKM dalam rangka memulai usaha baru atau mengembangkan usaha pada KPJu.

Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data:

1. Pembobotan Tujuan, Kriteria, dan Sektor/Sub Sektor

(i) Pada tingkat Provinsi: pembobotan tujuan, bobot sektor/sub sektor ekonomi dalam rangka pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keunggulan daya saing daerah/produk, dan kriteria. Hasil pembobotan terhadap tujuan serta kriteria digunakan untuk penetapan KPJu Unggulan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Nilai pembobotan ini berlaku sama untuk semua Kecamatan dan Kabupaten serta sektor/sub sektor

(ii) Pada tingkat kabupaten: pembobotan sektor/sub sektor ekonomi dalam rangka pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keunggulan daya saing daerah/produk. Nilai pembobotan ini digunakan dalam rangka penetapan KPJu Unggulan Lintas Sektor di tingkat Kabupaten dengan menggunakan metode Bayes.

2. Penentuan KPJu Unggulan Per Sektor/Sub Sektor Ekonomi di tingkat Kecamatan

Berdasarkan daftar KPJu seluruh Kecamatan yang diperoleh dari data sekunder atau nara sumber, dilakukan penetapan KPJu tingkat kecamatan dengan menggunakan Metode Bayes yaitu metode yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan menggunakan beberapa kriteria. Penilaian setiap alternatif KPJu ditetapkan berdasarkan penilaian/pendapat narasumber yang diperoleh melalui pertemuan dengan narasumber di tingkat kecamatan yaitu mantri tani, mantri statistik,

staf/seksi perekonomian (d disesuaikan dengan kondisi kecamatan di masing-masing daerah). Berdasarkan analisis Bayes ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJu untuk setiap sektor/sub sektor ekonomi ditingkat Kecamatan.

3. Penentuan Kandidat KPJu Unggulan Per Sektor/Sub Sektor Ekonomi di Tingkat Kabupaten.

Berdasarkan hasil KPJu dari seluruh Kecamatan dengan metode Bayes, dilakukan pemilihan KPJu kabupaten dengan metode Borda. Metode Borda adalah metode yang dipakai untuk menetapkan urutan peringkat. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Borda ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) Kandidat KPJu untuk setiap sektor/sub sektor ekonomi ditingkat kabupaten untuk dipilih sebagai KPJu Unggulan Kabupaten.

4. Penentuan KPJu Unggulan Per Sektor/Sub Sektor di Tingkat Kabupaten

Tahap ini dilaksanakan dalam rangka proses penyaringan untuk menetapkan KPJu unggulan per sektor/sub sektor pada tingkat kabupaten. Analisis untuk penetapan KPJu unggulan dari hasil pemilihan KPJu di Kabupaten, dilakukan dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process*. *Analytic Hierarchy Process* (AHP) adalah alat analisis yang di dukung oleh pendekatan matematika sederhana yang digunakan untuk memecahkan permasalahan '*decision making*' seperti pengambilan kebijakan atau penyusunan prioritas.

Penilaian setiap alternatif KPJu ditetapkan berdasarkan penilaian/pendapat narasumber yang diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber di tingkat kabupaten, misal pejabat dinas/instansi, asosiasi, Kadin, Bappeda, perbankan dan peneliti/dosen perguruan tinggi. Berdasarkan analisis AHP ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJu untuk setiap sektor/sub sektor ekonomi ditingkat kabupaten. Melalui forum FGD, dimintakan pula pendapat dari para nara sumber mengenai alternatif kebijakan yang harus diambil dalam rangka pengembangan usaha KPJu unggulan yang telah teridentifikasi.

5. Konfirmasi 5 (lima) KPJu Unggulan untuk Setiap Sektor/Sub Sektor Ekonomi Ditingkat Kabupaten.

Pada tahap ini dilakukan konfirmasi 5 (lima) KPJu unggulan untuk setiap sektor/sub sektor yang telah diperoleh dengan menggunakan metode AHP, dan konfirmasi rekomendasi kebijakan untuk KPJu unggulan.

6. Penentuan KPJu Unggulan Lintas Sektoral di Tingkat Kabupaten

Berdasarkan hasil pemilihan KPJu per sektor/sub sektor di tingkat kabupaten dengan metode AHP, dilakukan pemilihan KPJu lintas sektoral dengan metode Bayes, untuk memperoleh skor bobot tertinggi yang merupakan *hasil kali antara skor KPJu Unggulan dengan bobot sektor/sub sektor ekonomi* dari KPJu Unggulan yang bersangkutan. Dalam hal ini sebelumnya dilakukan normalisasi nilai skor KPJu Unggulan yang bersangkutan. Berdasarkan perhitungan dengan metode diatas ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) KPJu lintas sektoral ditingkat kabupaten.

7. Penentuan KPJu Potensial Lintas Sektoral di Tingkat Kabupaten

Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Bayes di tingkat kabupaten, akan diperoleh KPJu yang tidak termasuk dalam lima besar KPJu unggulan. Selanjutnya, berdasarkan pendapat dan masukan dari para pakar serta pertimbangan lainnya, dari KPJu-KPJu tersebut dipilih KPJu-KPJu yang potensial/sangat potensial untuk menjadi KPJu unggulan di daerah penelitian. Kemudian masing-masing KPJu potensial dimaksud diidentifikasi kelemahan atau kekurangannya pada saat ini.

8. Pendalaman terhadap KPJu unggulan yang teridentifikasi berdasarkan Perspektif *Product Life Cycle (PLC)* dalam rangka penetapan KPJu unggulan lintas sektoral di tingkat kabupaten.

Pertanyaannya adalah apakah KPJu Unggulan tersebut masih berada pada posisi tahap introduksi, tahap pertumbuhan (*growth*), tahap matang (*mature*), atau sudah mencapai tahap kejenuhan dan cenderung menurun (*decline*). Perlu juga dianalisis sampai berapa lama KPJu tersebut mampu bertahan pada posisi tersebut.

HASIL PENELITIAN

Hasil KPJu unggulan ditentukan oleh kriteria dan sub-kriteria yang ditetapkan sebelumnya, dan penentuan kriteria tersebut dilandasi oleh Tujuan dari penetapan KPJu unggulan UMKM,

yaitu; (a) Penciptaan lapangan kerja, (b) Pertumbuhan ekonomi daerah, dan (c) Peningkatan daya saing produk. Untuk memperoleh keseragaman dan konsistensi dalam proses penetapan KPJu unggulan, maka bobot setiap Tujuan dan bobot setiap Kriteria yang digunakan pada semua Kabupaten adalah sama. Sehubungan dengan itu maka proses penentuan bobot kepentingan tujuan dan kriteria tersebut dilakukan pada tingkat provinsi. Dalam hubungan ini maka pada tanggal 12 Juni 2012 telah dilaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* di Kantor Bank Indonesia Banda Aceh yang diikuti pejabat dari Dinas/Instansi terkait pada Tingkat Provinsi.

Dalam pelaksanaan FGD tersebut, selain dilakukan penjelasan oleh Tim Peneliti tentang maksud dan tujuan kegiatan serta metodologi, maka salah satu tahapan pokok dalam penelitian ini adalah memperoleh penilaian dari peserta berupa skor kepentingan setiap Tujuan, serta skor tingkat kepentingan suatu Kriteria satu dibandingkan dengan Kriteria lain untuk Tujuan yang sama dengan menggunakan metode *pairwise comparison*. Hasil penilaian oleh nara sumber tersebut, dijadikan input analisis dengan menggunakan AHP untuk memperoleh nilai skor terbobot setiap Tujuan dan setiap Kriteria KPJu unggulan. Hasil analisis dengan menggunakan metode AHP berdasarkan masukan pendapat dari pejabat Dinas/Instansi yang terkait dan berkepentingan terhadap KPJu unggulan UMKM. Berdasarkan metodologi yang telah dikemukakan untuk menetapkan KPJu unggulan lintas sektor diperlukan informasi seberapa besar bobot kepentingan suatu sektor ekonomi untuk mencapai tujuan dari penetapan KPJu unggulan UMKM. Mengingat setiap Kabupaten mempunyai karakteristik wilayah dan potensi ekonomi yang berbeda, maka penetapan bobot kepentingan sektor/subsektor ekonomi tersebut dilakukan di tingkat Kabupaten dengan nara sumber pejabat Dinas/Instansi yang berkepentingan dalam pengembangan UMKM di tingkat Kabupaten.

Tabel 5
Bobot dan Rangking Kepentingan dari Tujuan dan Kriteria untuk Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2017

No	Aspek	Bobot
I Tujuan Penetapan KPJu Unggulan (Tujuan Makro Ekonomi)		
1	Penciptaan lapangan kerja	0.3805
2	Pertumbuhan ekonomi	0.3106
3	Peningkatan daya saing produk	0.3089
II Kriteria Penentuan KPJu Unggulan Tingkat Kecamatan		
1	Ketersediaan Input	0.3260
2	Pasar/Pemasaran Produk	0.2572
3	Kontribusi Perekonomian	0.2224
4	Jumlah Unit Usaha	0.1944
III Kriteria Penentuan KPJu Unggulan Tingkat Kabupaten		
1	Manajemen Usaha	0.1209
2	Penyerapan TK	0.1186
3	Modal	0.1080
4	Harga	0.1059
5	Sumbangan Perekonomian	0.1034
6	Ketersediaan Pasar	0.0898
7	Teknologi	0.0891
8	Saprodi	0.0805
9	TK Terampil	0.0804
10	Bahan Baku	0.0588
11	Sosial Budaya	0.0447

Sumber : Data Primer, Tahun 2017

Penetapan KPJu Unggulan Tingkat Kabupaten

Tahap pertama dilakukan melalui *indepth interview*, dan pengisian kuesioner kepada pejabat pemerintah daerah (Sekda dan Bappeda, dinas/instansi terkait dan perbankan di setiap Kabupaten. Dalam hal ini Tim Peneliti mengundang narasumber pada kantor Bappeda. Pada tahap ini setiap narasumber dari pejabat pemerintah daerah dan dinas/instansi terkait memberikan penilaian terhadap:(1) Tingkat kepentingan antar sektor secara umum, dan (2) Untuk memperoleh penilaian dari narasumber tentang keunggulan suatu KPJu terhadap KPJu yang lain berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (11 kriteria). Penilaian (*scoring*) terhadap setiap kriteria didasarkan atas prinsip kemudahan bagi UMKM dalam rangka

menjalankan usaha, membuka usaha baru atau mengembangkan usaha, serta sejauh mana dukungan wilayah pada setiap unsur penilaian. Analisis dengan metode AHP menghasilkan nilai skor terbobot setiap kandidat KPJu unggulan untuk setiap kecamatan per sektor ekonomi. KPJu Unggulan kabupaten ditetapkan 5 KPJu untuk setiap sektor/subsektor yang memiliki skor terbobot tertinggi. Berdasarkan hasil identifikasi KPJu Unggulan setiap sektor/subsektor, nilai skor masing-masing KPJu Unggulan dan tingkat kepentingan Sektor/subsektor ekonomi untuk KPJu yang bersangkutan ditetapkan KPJu unggulan lintas sektor tingkat kabupaten. Metode yang digunakan adalah metode *Bayes*.

Tabel 6
Skor Terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Urutan Kepentingan Dalam Rangka Penetapan KPJu Unggulan di Kabupaten Aceh Utara

Sektor Usaha	Tujuan (Skor Terbobot)			Skor Terbobot Gabungan	Rangking
	Pertumbuhan ekonomi	Penciptaan lapangan kerja	Peningkatan daya saing produk		
	0.3106	0.3805	0.3089		
Tanaman Pangan	0.1129	0.1075	0.1005	0.1070	1
Perkebunan	0.0990	0.1070	0.1113	0.1058	2
Peternakan	0.1017	0.0897	0.0864	0.0924	3
Perdagangan	0.0871	0.0912	0.0929	0.0904	4
Perikanan	0.0878	0.0905	0.0924	0.0902	5
Industri	0.0886	0.0895	0.0889	0.0890	6
Jasa	0.0846	0.0861	0.0872	0.0860	7
Kehutanan	0.0839	0.0859	0.0867	0.0855	8
Pertambangan	0.0843	0.0850	0.0860	0.0851	9
Angkutan	0.0855	0.0844	0.0847	0.0848	10
Pariwisata	0.0847	0.0833	0.0831	0.0837	11

Sumber : Data Primer, Tahun 2017 (diolah)

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan tingkat kabupaten beserta bobot kepentingan masing-masing kriteria yang telah dihasilkan sebelumnya (analisis AHP menghasilkan KPJu unggulan setiap sektor ekonomi UMKM dengan urutan dan nilai skor terbobot seperti disajikan pada Tabel 6. Kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Utara berbasis pada sektor pertanian dengan masuknya 8 sektor usaha

dibidang pertanian satu bidang jasa bidan dan peternakan hewan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh 10 (sepuluh) KPJu unggulan lintas sektor berdasarkan urutan nilai skor terbobot KPJu yang bersangkutan, seperti disajikan pada Tabel 7. Kabupaten Aceh Utara hingga saat ini, tercatat bahwa sektor perkebunan masih menjadi sektor primadona dengan komoditi kakao, sawit dan karet yang menjadi andalan utamanya.

Tabel 7
10 KPJu Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJu Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Aceh Utara

Rangking	Sektor/ Subsektor	KPJu	Bobot
1	Perkebunan	Kakao	0.0284
2	Padi Palawija	Padi	0.0271
3	Perkebunan	Sawit	0.0268
4	Perikanan	Penangkapan dilaut	0.0266
5	Sayuran	Cabe	0.0258
6	Perkebunan	Karet	0.0245
7	Buah-Buahan	Durian	0.0239
8	Peternakan	Budidaya ayam ras	0.0230
9	Jasa	Praktek Bidan	0.0227
10	Industri	Kerajinan	0.0224

Sumber : Data Primer, Tahun 2017 (diolah)

Lifecycle KPJu Lintas Sektor

Berdasarkan hasil FGD potensi unggulan untuk usaha yang ada di Aceh Utara adalah perkebunan dan padi palawija. Luas areal pertanian dan perkebunan menjadikan kedua

sektor tersebut menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat aceh utara. Usaha pertanian yang meliputi: kakoa, karet, sawah, sayur-sayuran dan buah-buahan telah memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Tabel 8 Lifecycle KPJu Lintas Sektor

No	KPJu	KPJu Lifecycle			
		Pengenalaan	Pertumbuhan	Kematangan	Penurunan
1	Perkebunan			√	
2	Padi Palawija			√	
3	Perkebunan			√	
4	Perikanan			√	
5	Sayuran			√	
6	Perkebunan			√	
7	Buah-Buahan		√		
8	Peternakan			√	
9	Jasa		√		
10	Industri		√		

Sumber: FGD Tingkat Kabupaten

Lifecycle Kakao, padi, dan penangkapan ikan dilaut mengalami kematangan. Karenakan pada beberapa titik perkebunan sawit merupakan peninggalan belanda disamping itu Aceh Utara juga pernah menjadi lumbung padi untuk Aceh. Banyaknya jumlah TPI di Aceh Utara menjadikan pusat penampungan ikan seperti TPI di Seunuddon, Lapang, Tanah Pasir dan Muara Batu

Berdasarkan hasil FGD menyebutkan bahwa sektor perikanan dan jasa memiliki potensi yang sangat baik di Aceh Utara. Selama ini sektor perikanan dan jasa sudah memberikan kontribusi dalam bentuk PDRB yang lebih baik di bandingkan sektor perdagangan. Perikanan juga menjadi sektor usaha yang sangat produktif, wilayah Aceh Utara yang sebagian besar meliputi wilayah pesisir sangat mendukung dalam usaha pengembangan komoditas perikanan masa yang akan datang.

PENUTUP

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta referensi dari pemangkku kebijakan. Identifikasi KPJu Unggulan per sektor dan lintas sektor seyogyanya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai KPJu Unggulan dalam rangka pengembangan UMKM. Termasuk penyediaan

infrastruktur yang lebih baik dalam mengembangkan komoditas unggulan di daerah masing-masing seperti jalan/jembatan, termasuk *data base* yang menyangkut berbagai data indikator kunci keberhasilan UMKM, seperti jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan jaringan pemasaran, sekaligus menjadi bahan untuk promosi yang pada akhirnya dapat mendorong daya tarik investasi.

Penelitian ini menghasilkan bahwa; aspek tujuan Penciptaan lapangan kerja baru di Kabupaten Aceh Utara diharapkan menjadi skala prioritas bagi pemegang wewenang. Oleh karenanya, sangat penting membuat program/kegiatan untuk menumbuh-kembangkan kelompok wirausaha baru untuk usaha KPJu Unggulan dengan sasaran Sarjana yang baru lulus dari Perguruan Tinggi Daerah sebagai calon pelaku usaha. yang sudah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk perbankan dalam menentukan prioritas penyaluran kredit UMKM. Dengan menggunakan hasil penelitian ini, pihak perbankan dapat mengetahui dengan jelas komoditas atau usaha unggulan yang perlu didukung dan dikembangkan. Dalam konteks ini, pihak perbankan perlu mengembangkan skema-

skema kredit yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dalam upaya pengembangan usahanya.

Pengembangan Klaster yang selama ini telah dilaksanakan pada komoditi tertentu perlu diperluas dan diterapkan pada KPJu Unggulan, dengan lebih meningkatkan keterlibatan dan koordinasi antar pelaku inti dan institusi pendukung (SKPD terkait; Perbankan, Perguruan Tinggi, dan instansi Litbang). Dalam kaitan dengan aspek rantai nilai tambah (*value-added chain*) dalam pendekatan klaster, maka proses peningkatan nilai tambah KPJu Unggulan seyogyanya dirancang agar sebesar-besarnya dapat dinikmati oleh pelaku UMKM.

Program pendampingan bagi UMKM KPJu Unggulan adalah sangat penting dan perlu lebih diintensifkan serta dilaksanakan secara lebih berkesinambungan. Sehubungan dengan itu, keterlibatan kelembagaan pendamping seperti *Business Development Service (BDS)* atau Inkubator Bisnis UMKM yang sudah ada perlu lebih meningkatkan peran dan fungsinya dengan dukungan Perguruan Tinggi dan Instansi terkait.

Perlu dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif, untuk membangun Model Implementasi Pengembangan Usaha KPJu Unggulan untuk UMKM pada Setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini menjadi penting mengingat karakteristik antar wilayah

relatif heterogen, sehingga program/kegiatan yang direncanakan dapat berhasil secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Michael, *Performance Management*, Tugu Publisher, Yogyakarta, 2004.
- Daihani, D. Umar. 2001. *komputerisasi Pengambilan Keputusan*. PT Elekmedia Komputindo, Jakarta
- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Gramedia, Jakarta, 2005
- Kosasi, S. 2002. *Sistem Penunjang Keputusan (Decision Support System)*. Departemen Pendidikan Nasional, Pontianak.
- Marimin. 2004. *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Penerbit PT Grasindo, Jakarta.
- Saaty, T.L. 2001. *Decision Making For Leaders*. Forth edition, University of Pittsburgh, RWS Publication.
- Saaty, T.L. 1988. *Multicriteria Decision Making : The Analytic Hierarchy Process*. University of Pittsburgh, RWS Publication, Pittsburgh
- Suryadi, K. dan Ramdhani, MA. 1998. *Sistem Pendukung Keputusan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.